MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRAJAK, DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN
PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.bldk.mahkamahagung.go.id, puslitbangkumdil@mahkamahagung.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 221/BSDK.2/ST.KP7.1/IV/2025

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka Penyusunan Naskah Urgensi Perpres tentang Pengalihan Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung.

Dasar :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
2. Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Keputusan Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07/BSDK.2/SK.HK1.2.5/II/2025 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Naskah Urgensi Perpres tentang Pengalihan Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung tanggal 28 Februari 2025;
4. Surat Keputusan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/BSDK.2/SK.HK1.2.5/IV/2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Finalisasi Draf Naskah Urgensi dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengalihan Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung tanggal 23 April 2025.

M E N U G A S K A N :

Kepada :

No.	Nama/NIP/Golongan	Jabatan
1.	Muh. Ridha Hakim 198904142015031003 – III/b	Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional
2.	Agus Abdur Rahman 198208022009041002 – IV/a	Hakim Yustisial Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN MA RI

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

3.	Andhy Martuaraja 198607142011011011 – III/d	Hakim Yustisial Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA RI
4.	M. Zaky Albana 198904212015031002 – III/b	Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI
5.	Zulfia Hanum Alfi Syahr 199004042015032003 – III/d	Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional
6.	Madya Putra Yaumil Ahad 199212062018011005 – III/c	Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional
7.	Hilda Marhamah 198310082009122007 – III/c	Operator - Penata Layanan Operasional Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI
8.	Weldinar Sirait 198601192020121004 – III/a	Pranata Komputer Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI
9.	Andi Nursuasri Aini	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI

Untuk : Melakukan perjalanan dinas dalam negeri ke kantor Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI, Jl. Cikopo Selatan, Kec. Megamendung Jawa Barat dalam rangka melaksanakan Rapat Kerja Finalisasi Draf Naskah Urgensi dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengalihan Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung, pada tanggal 05 s.d 09 Mei 2025

Segala biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025 Nomor : 005.06.1.610378/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 23 April 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan

Andi Akram
NIP. 197011141994031004

Tembusan :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA RI (sebagai laporan);
3. Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN MA RI;
4. Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN;
5. Sekretaris Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
6. Kasubbag Kepegawaian Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA RI;
7. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.